

## ABSTRAK

**Nazifah, 230211050141.** *Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga.* Pembimbing (I) Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., dan Pembimbing (II) Dr. Halimatus Sakdiah, S.Ag, M.Si pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

**Kata Kunci:** UPTD PPA, Konflik Keluarga, Penyelesaian Konflik

Konflik dalam keluarga merupakan permasalahan sosial yang berdampak langsung terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, sehingga memerlukan intervensi lembaga yang memiliki pendekatan holistik dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan non litigasi. Serta kendala dan strategi yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala UPTD PPA, tenaga ahli hukum, dan klien UPTD PPA. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari pernyataan informan, observasi serta temuan lapangan. Analisis ini dilakukan dengan mencocokkan antara temuan empiris, dokumen hukum, dan kerangka teori dengan pendekatan antropologi Hukum dan psikologi Hukum. yang digunakan, untuk menggambarkan secara mendalam peran UPTD PPA dalam penyelesaian konflik keluarga serta tantangan yang dihadapinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Banjarmasin memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan solusi alternatif dalam penyelesaian konflik keluarga. Meskipun demikian, implementasi layanan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap layanan yang tersedia. Diperlukan strategi optimalisasi berupa penguatan kapasitas SDM, intensifikasi sosialisasi, dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan perlindungan keluarga berbasis nilai hukum, kemanusiaan, dan kearifan lokal.